

Implikasi Kebijakan Proporsi Siswa SMK Berbanding SMA 30 : 70 Terhadap Peran LPTK –PTK Dalam menghasilkan Calon Guru Profesional

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 dan 29 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik dibuktikan dengan tingkat pendidikan minimal diploma empat (D IV) atau sarjana (S1), baik untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan teknologi dan kejuruan. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8, 9 dan 10 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik (diploma empat atau sarjana), kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional diperoleh melalui pendidikan profesi.

Implementasi Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang No 14/2005 tentang Guru dan Dosen khususnya pada Guru SMK memiliki keunikan dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Pertama, SMK memiliki jumlah bidang keahlian sebanyak 34 (tiga puluh empat) dengan jumlah program keahlian sebanyak 121 (seratus dua puluh satu). Kedua, sasaran pembangunan pendidikan kejuruan (SMK) untuk memproyeksikan lulusannya menciptakan lapangan pekerjaan (berwirausaha) 20%, mendapat pekerjaan dalam negeri sebesar 50% dan mendapat pekerjaan luar negeri sebesar 10% serta melanjutkan ke perguruan tinggi sebesar 10%. Untuk merealisasikan sasaran di atas diperlukan guru-guru SMK yang memiliki kompetensi profesional yang terstandar sesuai dengan standar dunia usaha/industri. Selain itu guru juga harus memenuhi tuntutan kompetensi

pedagogik, kepribadian, dan sosial. Berdasarkan argumentasi tersebut melalui FPTK Universitas Pendidikan Indonesia merupakan lembaga penghasil guru SMK merasa terpanggil untuk terlibat langsung untuk memberikan pokok-pokok pikiran dalam mengembangkan guru SMK.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta memperhatikan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2010 pengembangan SMK dengan proporsi 70% dan SMA 30% yang memiliki jumlah bidang keahlian sebanyak 34 (tiga puluh empat) dengan jumlah program keahlian sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) merupakan tantangan, kecemasan sekaligus harapan bagi FPTK-UPI, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kebutuhan penyediaan guru SMK yang akan terus berkembang sejalan otonomi daerah, perkembangan iptek dan tuntutan global mengharuskan perguruan tinggi LPTK PTK untuk meningkatkan relevansi dengan terus melakukan reorientasi dan diversifikasi program studi dan program keahlian.
2. Reorientasi perguruan tinggi LPTK PTK untuk meningkatkan relevansi dan kemampuan kompetensi bidang studi telah dilakukan melalui *wider mandate* sejak tahun 1997, utamanya untuk memperkuat bidang studi yang sudah ada. Namun demikian sejalan dengan dibukanya beberapa SMK baru, seperti SMK Pertanian, SMK Peternakan, SMK Perikanan, SMK Pertambangan, dan SMK baru lainnya belum dibarengi dengan dibukanya program studi baru di LPTK PTK secara signifikan. Di sisi lain untuk membuka jurusan/prodi baru di LPTK tidak mudah mendapat rekomendasi.
3. Reorientasi program LPTK PTK tidak optimal karena pengadaan tenaga pendidik bisa di *supply* lulusan diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) non LPTK. Apalagi dalam pengadaan guru menurut Kepmendiknas Nomor 20/U/2001 tentang pengadaan guru yang tidak dihasilkan perguruan tinggi LPTK PTK, pelaksanaannya tidak konsisten. Di beberapa daerah untuk memenuhi guru SMK "BELMO" (bangunan, elektronika, listrik, mesin, otomotif) dapat dipenuhi dari lulusan perguruan tinggi Non LPTK dengan menambah program akta mengajar.

4. Adanya kecemasan manakala pelaksanaan pengadaan guru yang diatur menurut UU Nomor 14/2005 dan PP Nomor 19/2005 tidak dibarengi dengan komitmen yang sejalan dengan Kepmendiknas Nomor 020/U/2001 tentang pengangkatan guru Sekolah Menengah Kejuruan dari lulusan perguruan tinggi non LPTK.

BAB II

A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG MELATAR BELAKANGI

BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI)

- Badan Nasioanal Sertifikasi Profesi (BNSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 ats perintah UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. BNSP bertugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.
- Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan sistem dan kelembagaan paradigma baru pengembangan SDM berbasis kompetensi. Dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi ada tiga pilar utama yang harus dibangun secara sinerjik, yaitu pengembangan standar kompetensi nasional, pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi yang independen.

TUNTUTAN KOMPETENSI GURU PTK BERDASARKAN BNSP DAN BSNP

BNSP

- IDENTIFIKASI KOMPETENSI KERJA GURU (SKGP) :
 1. KOMPETENSI PEDAGOGIK
 2. KOMPETENSI KEPRIBADIAN
 3. KOMPETENSI PROFESIONAL
 4. KOMPETENSI SOSIAL

BNSP

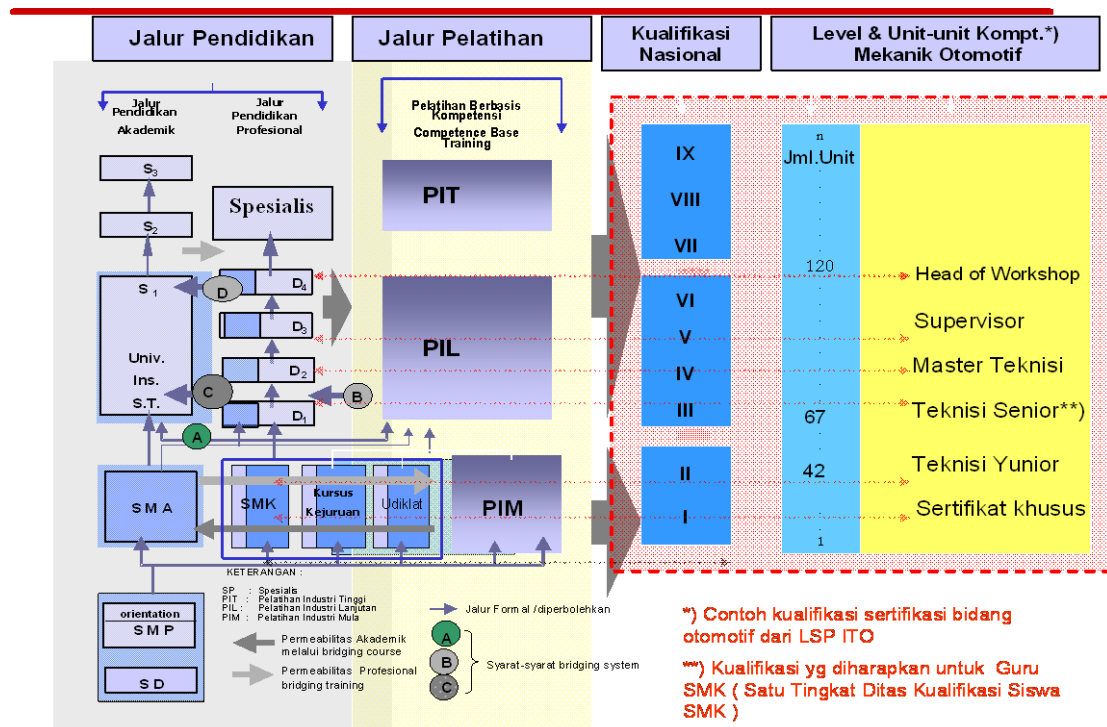
- IDENTIFIKASI KOMPETENSI PEKERJA DI INDUSTRI (SKKNI) :
 1. KOMPETENSI PELAKSANA MUDA/*JUNIOR*

- 2. KOMPETENSI PELAKSANA MADYA/SENIOR
- 3. KOMPETENSI PELAKSANA UTAMA/MASTER

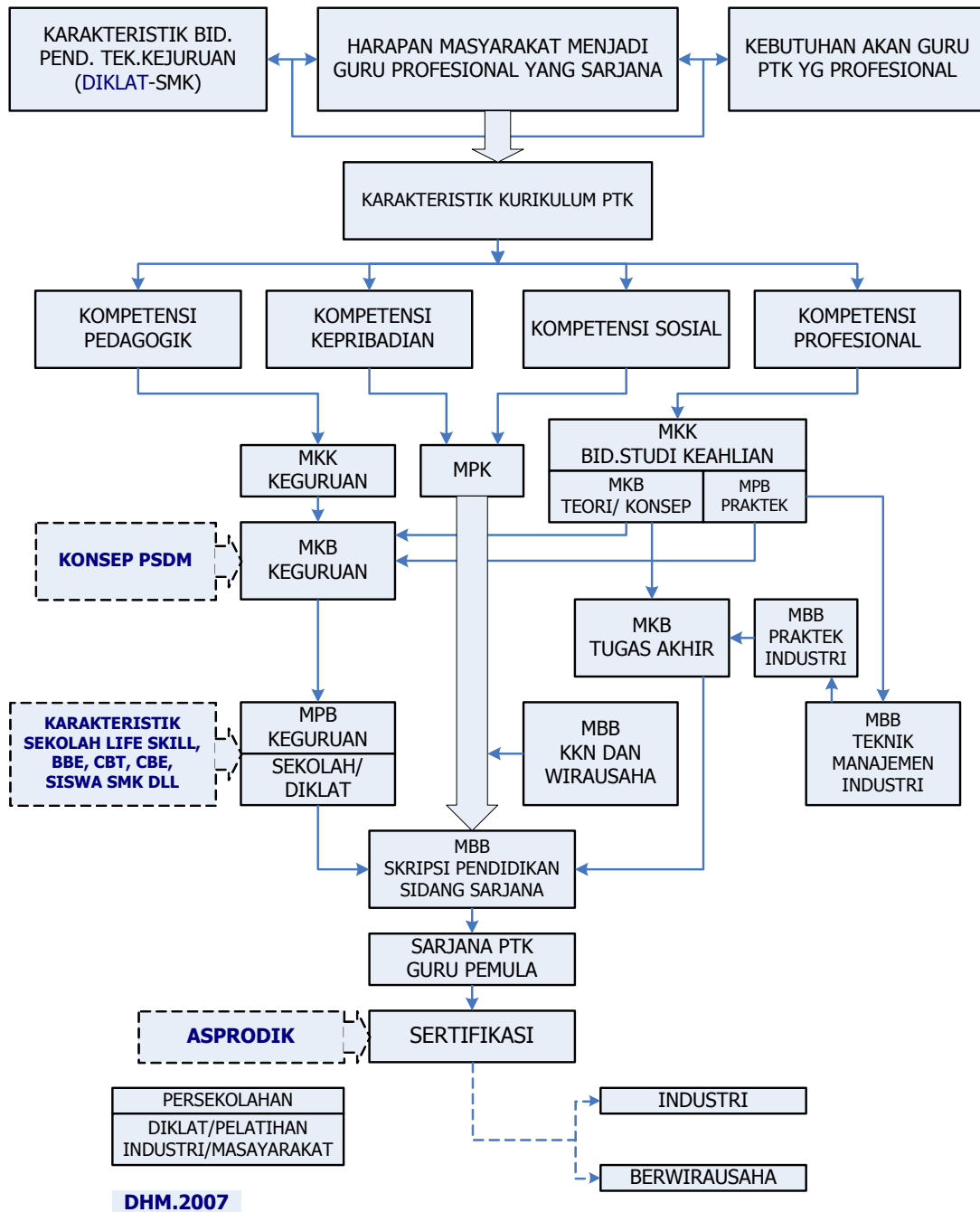
SINKRONISASI BNSP & BSNP

- PENYESUAIAN KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN DI LAPANGAN KERJA (PROFIL KOMPETENSI GURU SMK) DENGAN PROFIL KOMPETENSI YANG TERDAPAT DALAM KURIKULUM SERTA MENGACU PADA STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

CONTOH JALUR DIKLAT BERDASARKAN PERAN BNSP DAN BSNP DALAM PTK



PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PROFESIONALISME GURU DI LPTK PTK



Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Menghadapi Globalisasi

Sebagai upaya mengantisipasi perubahan zaman, pada perguruan tinggi telah dilakukan beberapa kali redesign kurikulum, tetapi perubahan tersebut tidak merubah seluruh kebutuhan perubahan ubahan pada komponen kurikulum

(tujuan, organisasi isi, dan evaluasi), sehingga dalam implementasinya masih tetap menggunakan pola-pola dan strategi pada kurikulum sebelumnya. Tuntutan untuk meredesain kurikulum pada kebijakan pengembangan kurikulum kah ini berkaitan dengan perubahan paradigma baru pendidikan yakni pergeseran dari "transfer pengetahuan" menjadi "berorientasi proses" atau "berbasis kompetensi". Perubahan paradigma ini sudah tentu akan berakibat pada timbulnya beberapa permasalahan baru yang mungkin menjadi kendala pada tahap implementasinya.

Kebijakan pengembangan kurikulum dengan tujuan kompetensi lulusan merupakan solusi utama dalam menyelesaikan persoalan kualitas lulusan dunia pendidikan. Namun akan tetap membutuhkan analisis yang lebih mendalam dalam tingkat Perguruan Tinggi berfungsi bukan hanya menghasilkan lulusan professional tetapi juga akademik. Salah satu aspek yang merupakan indikator mutu suatu perguruan tinggi adalah aspek relevansi yang disidik berdasarkan mutu lulusan. Selanjutnya mutu lulusan dimaksud akan diukur berdasarkan keterpakaian lulusan dalam mengisi dunia kerja, karya-karya inovatif lulusan serta sistem penghargaan terhadap lulusan.

Metode pengembangan kurikulum seharusnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum
- Deskripsi *outcome* program pendidikan berupa kemampuan, pengetahuan, dan keahlian lulusan
- Pengembangan kurikulum dan silabus/GBPP secara efisien,
- Mempertimbangkan kebutuhan *stakeholder*
- Memperhitungkan sumberdaya yang ada untuk pelaksanaan proses belajar mengajar
- Cakupan pengetahuan yang diberikan sesuai dengan struktur ilmu bidang studi
- Tersedia prosedur evaluasi dan peningkatan kurikulum secara berkala

Di dalam kurikulum memuat arah dan tujuan, pengorganisasian materi, gambaran proses belajar mengajar, dan penilaian atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik utama suatu kurikulum adalah bersifat dinamis,

adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan dan dinamika social dan IPTEKS. Kurikulum yang bersifat kaku justru akan lembaga-lembaga pendidikan terjebak dalam dinamika tuntutan masyarakat. Kebijakan pengembangan kurikulum yang saat ini diterapkan lebih menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan dan lebih populer dikenal dengan *kurikulum berbasis kompetensi*. Perbedaan mendasar antara kurikulum lama dengan kurikulum berbasis kompetensi adalah dalam sistem penilaian. Untuk menilai kompetensi lulusan harus digunakan penilaian acuan patokan (PAP) sehingga pengembangan sistem penilaian (termasuk soal-soal baku) seharusnya menjadi suatu keharusan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi lulusan merupakan modal utama untuk *berkompetisi* baik di tingkat lokal, regional maupun global. Kemampuan berkompetisi akan lahir dari kurikulum yang landasan berpikirnya adalah kompetensi dan di dalamnya telah mengandung standar mutu.

Kurikulum sebagai rencana tertulis, diwarnai oleh "kurikulum sebagai teknologi", konsepsi ini dibawah naungan Teknologi Pendidikan. Karena itu, rencana, ide-ide, atau gagasan-gagasan yang akan dituliskan ke dalam suatu dokumen seyogyanya berpegang pada acuan teknis kurikulum sebagai rencana. Dengan demikian kurikulum lebih mudah dan efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak, pimpinan sekolah, pengawas, pelaksana, dan staf pendukung lainnya. Konsepsi ini merupakan esensi dari suatu teknologi, membantu untuk memudahkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan kegiatan manusia. Dalam hal ini tujuan itu adalah mengorganisasikan isi dan bahan pelajaran.

Dalam mengorganisasikan isi dan bahan pelajaran, suatu kurikulum tidak terlepas dari pendekatan-pendekatan yang diyakini, dan ini berkaitan dengan penggunaannya pada jenis pendidikan apa dan pada tingkat mana. Dalam definisi kurikulum di atas, hal itu berlaku umum dari pendidikan prasekolah sampai ke perguruan tinggi. Begitu juga pendekatan-pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan landasan teori yang dianut. Dalam Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 penyusunan, kurikulum pendidikan tinggi tidak eksplisit dikemukakan untuk mengacu pada satu konsep

tertentu. Tetapi bila dicermati dalam butir-butir yang tertuang di dalamnya terlihat penekanan pada kurikulum berbasis kompetensi. Dapat dilihat pada pasal 2 tentang kompetensi hasil didik suatu program studi dan elemen-elemen kompetensi; dan pasal 3 tentang pencirian kompetensi utama dan kompetensi pendukung dan lainnya (Kepmendiknas RI No. 045/U/2002). Pasal-pasal ini jelas menggambarkan, bahwa diharapkan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi mengacu pada konsep kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Atas dasar pemikiran ini, penyusunan kurikulum yang didiskusikan selanjutnya tunduk pada pola-pola teknis yang dikembangkan dalam pendekatan Pendidikan Berbasis Kompetensi (PBK).

Sebenarnya, konsep pendidikan berbasis kompetensi telah lama dikenal (Torshen, 1977). Namun konsep tersebut tidak berkembang dalam dunia pendidikan akademik. Pendidikan profesional lebih mudah mengadopsi konsep kompetensi dibandingkan pendidikan akademik. Kurikulum yang bermuara pada kompetensi yang lebih dahulu dipopulerkan dalam pelatihan atau pendidikan profesional dan dapat diadopsi oleh pendidikan akademik dengan beberapa adaptasi atau penyesuaian. Adopsi kurikulum berbasis kompetensi dalam dunia pendidikan tedadi dengan bergesernya paradigma pendidikan dari "transfer pengetahuan" menjadi "berorientasi proses" atau "berbasis kompetensi" (Hoogveld, 2003). Pergeseran ke arah pendidikan berbasis kompetensi dipicu oleh meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten (Levesque, 2000).

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari keahlian, kemampuan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu (Vorhees, 2001). Dalam Kepmendiknas No.045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. *Australian National Training Authority's* (ANTA) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut (ANTA, 2003):

"The concept of coinpeteny focuses on what is expected of an employee in workplace rather than the learning process, and embodies the ability to transfer and apply skills and knowledge to new situations and

environments"

Berdasarkan definisi tentang kompetensi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan, bahwa pengukuran kompetensi seseorang dilakukan setelah yang bersangkutan bekerja di masyarakat. Hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan adalah merumuskan kompetensi dan menentukan *standar kompetensi* untuk suatu program pelatihan atau pendidikan yang dilakukan. Standar dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang ditetapkan dan dimantapkan (oleh yang berwenang) untuk mengukur kualitas (Whitaker, 1989). Standar kompetensi harus mencerminkan standar mutu lulusan yang ditetapkan. Kompetensi selanjutnya dijabarkan dalam elemen-elemen kompetensi (Kepmendiknas No.045/U/2002) atau kompetensi-kompetensi dasar yang ditetapkan untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu. Kami berpendapat bahwa *penilaian mutu lulusan* harus dikaitkan dengan membandingkan kinerja lulusan dengan harapan-harapan yang ditetapkan, sedangkan *penilaian kompetensi lulusan* harus dikaitkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jika penilaian dianalogikan dengan sebuah film, maka penilaian kompetensi lulusan dapat dianalogikan dengan sebuah cuplikan babak sedangkan penilaian mutu lulusan dianalogikan dengan keseluruhan film.

Kompetensi berkaitan dengan relevansi, efektivitas, dan efisiensi; artinya seseorang dapat dikatakan kompeten jika pekerjaan yang dilakukan relevan dengan pengetahuan dan keahliannya dan diselesaikan secara efektif dan efisien. Jika pekerjaan tidak diselesaikan secara efisien, maka pelaksana pekerjaan itu belum dapat dikatakan kompeten. Kompetensi dapat diperoleh melalui pengalaman belajar integratif setelah memperoleh pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Perlu diperhatikan bahwa demonstrasi penguasaan pengetahuan tidak mencerminkan demonstrasi kompetensi (McKee, 2003). Sejalan dengan itu, ada 4 kompetensi yang perlu diperhatikan dalam penilaian, yaitu:

- kompetensi teknis, yaitu keahlian teknis dan pengetahuan akan teknologi penguasaan pengetahuan yang relevan
- kompetensi sikap, yaitu reaksi kandidat dalam kondisi tertentu.

- Keahlian antar personal, yaitu bagaimana interaksi kandidat dengan orang lain

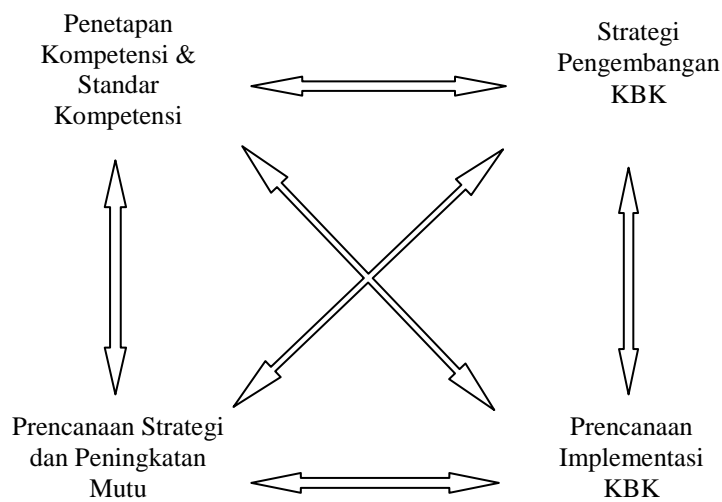
Pengelompokan kompetensi seperti di atas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan kategori elemen-elemen kompetensi yang dirilis dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000, yaitu: 1) kompetensi kepribadian, 2) kompetensi keilmuan dan keterampilan, 3) kompetensi keahlian berkarya, 4) kompetensi perilaku berkarya, dan 5) kompetensi bermasyarakat. Elemen-elemen kompetensi tersebut harus tersebar dalam kompetensi utama (atau kompetensi inti), kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan terkait dengan kompetensi utama (Kepmendiknas No. 232/U/2000). Setiap kompetensi harus dirumuskan bersama indikator kinerja atau standar kompetensi yang ditetapkan. Standar kompetensi dapat semakin ditingkatkan seiring dengan peningkatan kualitas belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut.

Kompetensi lulusan pendidikan akademik dapat dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi lembaga pendidikan, kebutuhan masyarakat (sosial dan industri), kebutuhan profesi, dan hasil evaluasi diri serta analisis SWOT. Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat diperlukan survey atau dengar pendapat dari *stakeholder*. Sedangkan untuk mengetahui kebutuhan profesi diperlukan urung rembuk sesama lembaga pendidikan sejenis dan analisis deskripsi kerja profesi. Kebutuhan profesi harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan profesi dalam 10 tahun ke depan. Mekanisme pengembangan kurikulum yang ditetapkan dalam Kepmendiknas No.045/U/2002 telah memperhatikan mekanisme urun rembuk antar universitas dan dengar pendapat *stakeholder*.

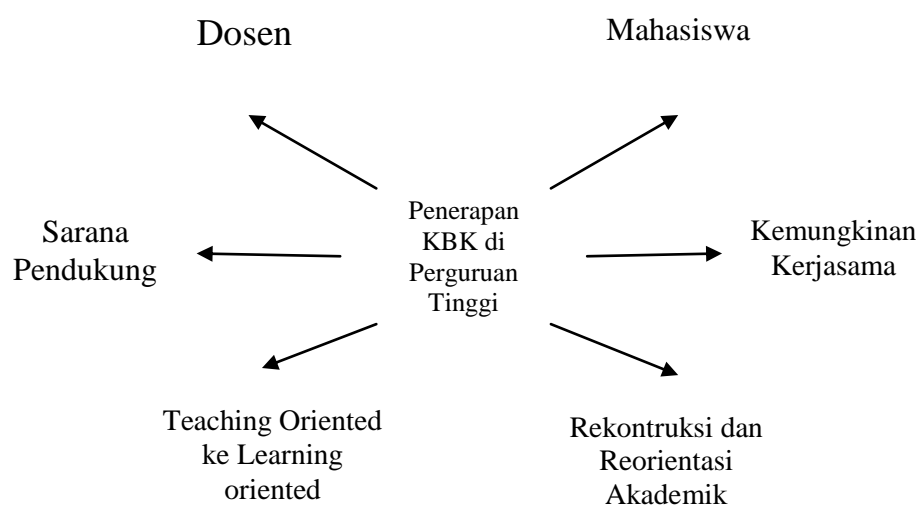
Strategi identifikasi kompetensi yang ditempuh oleh perguruan tinggi minimal dengan 3 cara, yaitu: (1) meminta masukan dari kalangan profesi; (2) masukan dari pengguna lulusan (*users*); dan (c) analisis tugas (*task analysis*). Identifikasi kompetensi ini menghasilkan koleksi kompetensi yang selanjutnya *dimapping* dan diperhalus, karena tidak semua kompetensi dari koleksi tersebut dapat atau tidak harus diperoleh melalui proses belajar di perguruan tinggi. Hasil *mapping* dan *refining* ini selanjutnya diolah untuk membentuk kurikulum.

Kurikulum yang disusun di sini merupakan kurikulum ideal karena penyusunannya belum memperhitungkan sumberdaya pendukung yang dibutuhkan sebagai prasyarat terselenggaranya proses belajar mengajar.

Penetapan kompetensi harus diikuti dengan pemikiran evaluasi (pengendalian Mutu) yang akan dilakukan, juga harus memikirkan strategi implementasi yang akan diterapkan agar mahasiswa, dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan, sehingga keseluruhan komponen proses perencanaan yang dilukiskan dalam Gambar dibawah ini.



Konsekuensi KBK di perguruan tinggi akan bersentuhan dengan komponen yang terlibat dalam kegiatan atau, proses belajar mengajar, seperti mahasiswa, dosen, sarana dan prasarana pendukung, peraturan akademik, kedesama instansi, dan perubahan orientasi pembelajaran seperti diilustrasikan dalam Gambar 2.



Gambar Konsekuensi Penerapan KBK di Perguruan Tinggi

Prasyarat pendukung dari kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang ideal selanjutnya akan dihadapkan dengan kondisi sumberdaya pendukung yang nyata (riil) terdapat di perguruan tinggi. Konsekuensi terhadap dosen berkaitan dengan kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diajarkan. Oleh sebab itu, program studi harus melakukan evaluasi diri berkaitan dengan sumberdaya dosen yang tersedia. Indikator kesesuaian dosen adalah tingkat pendidikannya, bidang kajian, dan penelitian yang diteliti secara kontiniu. Dalam proses pengembangan KBK sangat penting melakukan evaluasi diri mengenai sebaran dosen program studi berdasarkan bidang kajiannya. Jika ada kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa tidak tersedia dosen yang relevan, maka harus dilakukan usaha mengatasi permasalahan tersebut (misalnya mendatangkan dosen tamu). Dalam rancangan implementasi jangka panjang harus dipikirkan peningkatan kualitas dosen (misalnya studi lanjut atau magang) agar permasalahan ketersediaan dosen relevan dapat diatasi. Kesiapan dosen dalam melaksanakan KBK juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam rancangan implementasi KBK, sehingga perlu dilakukan diseminasi rancangan KBK pada sivitas akademik sebelum penerapan KBK.

PROFIL LPTK-PTK
(FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN)

RELEVANSI PRODI DI LPTK

DENGAN

PROGRAM KEAHLIAN DI SMK



B. Kebijakan Proporsi Siswa SMK : SMA

Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya terhadap pembangunan pendidikan masa depan, telah menetapkan tujuan pendidikan nasional secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).

Salah satu pasal yang melandasi peran dan fungsi pendidikan yakni; pasal tiga (3) menegaskan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Pengejawantahan dari pasal yang mengandung nilai-nilai hakiki, diperjelas dengan rincian bentuk dan jenjang sesuai kebutuhan pembangunan sumber daya manusia masa depan. Salah satu bentuk pendidikan nasional pada jenjang menengah, adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti ditegaskan pada pasal 15 yakni; “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.

Secara konstitusi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SMK mempunyai peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal itu, sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan strategi pembangunan pendidikan nasional, diarahkan pada: (1) perluasan dan pemerataan akses masyarakat terhadap pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan (3) peningkatan produktivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam suatu pengaturan (*good governance*) pendidikan nasional di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, adanya semangat yang menjadi komitmen internasional dari pemerintah Indonesia dalam pembangunan kualitas manusia yang berorientasi global.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah berkenaan dengan SMK masa depan adalah proposi SMK : SMA dengan komposisi 70 : 30%. Komposisi tersebut, tentunya harus sesuai dengan tiga pilar strategi dasar. Artinya banyaknya SMK secara nasional perlu adanya kriteria dan indikator yang jelas, tidak hanya untuk meningkatkan akses dan pemerataan semata-mata, akan tetapi harus berorientasi pada relevansi dan mutu serta memperhitungkan produktivitas dan efisiensi. Demikian pula, keterkaitannya

dengan otonomi daerah mengingat ditinjau dari sistem administrasi pemerintahan kabupaten dan kota sangat mempengaruhi administrasi pendidikan yang di dalamnya akan mengatur sumber-sumber daya pendidikan yang mendukung pelaksanaan proposi SMK.

Implementasi kebijakan dipandang dari aspek teori, merupakan alat dan hukum administrasi di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik harus bekerja sinerjik, terkoordinasi secara sistemik untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena kompleks dalam proses dan keluaran (*output dan outcome*).

Suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002) mungkin dilaksanakan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

Anderson (1979:92-93) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu; *"who is involved in policy implementation, the nature of the administrative proces, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact"* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan (kompliansi) kepada kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi kebijakan).

Penjelasan tersebut, mengindikasikan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, akan tetapi termasuk jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (*intended*) dan dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Konsekuensi dari implementasi kebijakan proporsi tersebut, tentunya pihak-pihak terkait terutama yang berada di kabupaten dan kota perlu ada kejelasan *"frame work"* dari tiap tingkatan pemerintahan. Ditinjau dari peraturan yang ada

yakni; PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah otonom.

C. Kurikulum SMK

Salah satu jenis atau jalur pendidikan yang harus lebih peka terhadap perubahan pengetahuan dan teknologi yang dapat berimplikasi terhadap pengembangan kurikulumnya adalah sekolah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Salah satu tujuan khusus jenjang pendidikan kejuruan menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan kerja yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Dari uraian tujuan pendidikan ini tampak bahwa kompetensi yang dikuasai siswa hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta memiliki daya saing dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja.

Untuk itu kiranya diperlukan penelitian untuk menemukan kurikulum yang benar-benar sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Bila dikaji kurikulum yang baru sekarang ini, sebagai contoh kurikulum SMK edisi 2004 memuat tiga bagian, yakni **bagian pertama** memuat tentang landasan, program, pelaksanaan, penilain, dan pengembangan. **Bagian kedua** pedoman Garis-garis Besar Program Pendidikan dan Pelatihan (GBPP) yang berisi tujuan program keahlian, kompetensi keahlian, level kualifikasi tamatan ruang lingkup pekerjaan, profil kompetensi tamatan, substansi pembelajaran, diagram pencapaian kompetensi, susunan program pendidikan dan pelatihan serta deskripsi pembelajaran. **Bagian ketiga** memuat pedoman pelaksanaan kurikulum, berisi penjelasan tentang penyesuaian kurikulum, penyusunan program pembelajaran, penyusunan model, pengolahan pembelajaran, serta penilaian dan hasil belajar.

Selanjutnya pengembangan kurikulum SMK edisi 2004 dirancang menggunakan berbagai pendekatan yakni pendekatan akademik, pendekatan kecakapan hidup (life skill), pendekatan kurikulum berdasarkan kompetensi (**competency-based curriculum**), pendekatan kurikulum berbasis luas (**broad-based curriculum**), dan pendekatan kurikulum berbasis produksi (**production-based curriculum**). Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni pengembangan kurikulum berbasis kompetensi maka materi pelajaran atau pelatihan tidak lagi dalam bingkai mata pelajaran atau bidang studi, tetapi dikemas dalam berbagai kompetensi. Pertanyaan yang cukup menarik perhatian tentang kurikulum SMK edisi 2004 adalah apakah pengembangannya telah menggunakan pendekatan berbasis kompetensi? Apakah terlebih dahulu dilakukan analisis tugas hingga kompetensi dan sub kompetensi yang dapat diartikan sebagai mata pelajaran itu telah menggambarkan profil kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia kerja? Untuk itu sangat diperlukan keterlibatan organisasi atau himpunan profesi, dan berbagai pihak dunia usaha untuk memperoleh informasi secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum. Selain itu dinyatakan bahwa pengembangan kurikulum menggunakan pendekatan berbasis luas, apakah memang betul-betul telah dikembangkan dengan tujuan demikian? Pada hakikatnya **broad-based curriculum** ditujukan agar siswa memiliki kompetensi yang betul-betul ahli dalam satu bidang tertentu sebagai spesialisasinya, tetapi juga memiliki kompetensi dalam bidang lain. Cakupan dari pendidikan yang diperoleh siswa harus selebar mungkin agar mampu bekerja dalam bidang pekerjaan lainnya dengan persyaratan yang berdekatan dengan kualifikasi bidang kejuruannya. Selain itu pendidikan harus sedalam mungkin agar lulusan memiliki kualifikasi yang betul-betul sesuai dengan spesialisasinya. Dengan cara demikian akan memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi lulusan untuk dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kerja. Pola penyajian kurikulum dilakukan terstruktur mulai dari kemampuan dasar awal pendidikan, kemampuan lanjutan pada pertengahan jenjang pendidikan, dan kemampuan spesialisasi pada akhir pendidikan. Kebijakan ini sebenarnya mendapat sorotan juga, karena dengan memberikan kompetensi yang luas

bisa saja siswa menjadi kurang terampil dalam spesialisasinya, atau dengan kata lain bila lulusan dituntut menguasai kemampuan yang fleksibel akan melemahkan penguasaan spesialisasinya, padahal kecenderungan dunia kerja sekarang ini menuntut pembagian tugas yang makin menyempit sesuai dengan spesialisasi bidang kejuruannya. Untuk tujuan itu, sebenarnya perlu dipertimbangkan menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kluster (***cluster-based curriculum***) (Lubis, 1997). Hal ini sejalan dengan pendapat McNeil (1996) yang mengemukakan bahwa usaha yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara program kejuruan yang disiapkan sekolah dengan kebutuhan kerja adalah pendekatan kluster keterampilan. (***cluster of-skill***) yakni siswa dilatih dalam beberapa bidang jabatan. Seorang siswa yang mengikuti diklat di bidang automekanik mungkin bisa juga mengikuti diklat pada bidang mekanik industri, yang mencakup hidrolis, elektronik, dan lain-lain. Dengan contoh yang hampir sama, suatu diklat tentang program pelayanan kemanusiaan, dapat diberikan kursus dalam diklat menjaga atau merawat anak, orang cacat, dan orang lanjut usia lebih lanjut McNeil (1996) mengemukakan restrukturisasi kedua yang perlu dilakukan terhadap sekolah kejuruan adalah menambah program yang sesuai dengan kebutuhan-ekspansi industri. Program *quick start* mungkin perlu dikembangkan, misalnya akibat pertumbuhan sektor swasta dan pengaruh perkembangan ekonomi lokal dan dikaitkan dengan perdagangan bebas maka diperlukan internasionalisasi kurikulum bisnis agar, dapat meliputi materi yang berhubungan dengan kepentingan ekspor, serta pemasaran dan distribusi internasional merupakan respon terhadap perubahan ekonomi dunia. Pelaksanaan magang di industri merupakan cara ketiga untuk menghasilkan lulusan sekolah yang sesuai dengan dunia kerja. Dengan memperhatikan tujuan dan struktur kurikulum mungkin memunculkan pertanyaan bagi kita apakah kurikulum tersebut sudah akan dapat menghasilkan lulusan sekolah sebagai mana diharapkan? Apakah telah dilakukan penelitian dengan menggunakan prinsip pendekatan riset atau penelitian dengan melakukan uji lapangan? Untuk itu kiranya perlu pendekatan penelitian dalam mengembangkan (***research and development***) kurikulum sekolah.

A. Pengembangan Kurikulum

Pada dasarnya kurikulum merupakan segala kegiatan dan pengalaman belajar yang direncanakan, diprogramkan dan diselenggarakan lembaga pendidikan terhadap peserta didik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Finch dan Crunkilton (1984) kurikulum adalah sejumlah kegiatan dan pengalaman belajar yang dialami peserta didik yang diorganisasikan dan diarahkan oleh sekolah. Ini berarti bahwa kurikulum mengandung pengertian yang luas yang mencakup pengorganisasian semua kegiatan dengan tujuan agar lulusan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila ditinjau dari tujuan program pendidikan ada beberapa model konsep kurikulum antara lain kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum akademik, dan kurikulum kejuruan (Hass, 1987 dan McNeil, 1996).

Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa dalam mengembangkan potensi masing-masing. Dalam model ini siswa dipandang mempunyai potensi dan kemampuan untuk berkembang yang meliputi pengembangan sikap positif, pengembangan kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan berinovasi.

Materi yang disajikan merupakan materi yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Pendidikan diarahkan untuk membina manusia secara utuh dengan mengintegrasikan antara segi fisik dan intelektual dengan segi sosial dan afektif (emosi, sikap, dan nilai). Kurikulum rekonstruksi sosial lebih difokuskan pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat sehingga siswa mampu melestarikan nilai-nilai dan mengembangkan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Siswa didorong untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak untuk dipecahkan dan membekali siswa untuk dapat bekerja sama dalam memecahkannya.

Dalam model kurikulum ini penyelenggara program pendidikan berharap bahwa sekolah dapat melestarikan nilai-nilai masyarakat dan mengembangkan nilai-nilai tersebut dengan lebih baik. Kurikulum akademik lebih mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Namun demikian sekolah

tidak semata-mata menekankan penyerapan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya tetapi dengan memiliki berbagai disiplin ilmu siswa dapat diarahkan pada pengembangan intelektual meliputi kemampuan berpikir rasional, dan kemampuan mencari kebenaran. Teknik eksposisi dan inkuiri umumnya digunakan dalam kurikulum akademik. Ada dua fungsi penataan dalam kurikulum akademik yaitu integratif yakni menggabungkan pengalaman belajar dalam beberapa mata pelajaran dan urutan pemberian pengalaman belajar. Berkenaan dengan pendekatan integratif, misalnya mata pelajaran kimia, biologi, dari kimia digabungkan ke dalam pelajaran sains, sedangkan sejarah, geografi, ekonomi dan pemerintahan menjadi IPS. Urutan penatan mata pelajaran dikembangkan meliputi dari yang sederhana ke yang kompleks (misalnya binatang satu sel sebelum binatang banyak sel), keseluruhan menuju bagian, hirarki pelajaran, dan sebagainya (McNeil, 1996).

Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu, salah satu jenis sekolah yang memiliki materi pelajaran atau bidang studi relatif cepat berubah sesuai dengan permintaan lapangan kerja adalah sekolah kejuruan. Kurikulum kejuruan ditujukan untuk memberikan keterampilan khusus bagi siswa sehingga dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dalam dunia kerja. Oleh karena keterampilan dalam dunia kerja dapat berubah dengan cepat maka kurikulum yang ada harus menggambarkan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Ada sejumlah kesulitan yang dihadapi sekolah kejuruan dalam menghasilkan lulusan terampil sering dikaitkan orang dengan konsep sekolah kejuruan yang kurang jelas. Di satu pihak ada orang yang berpendapat bahwa sekolah kejuruan bertujuan untuk memberikan bekal pelajaran untuk bekerja, sementara di pihak lain ada pula yang berpendapat untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Sebenarnya titik berat sekolah kejuruan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan guna mempersiapkan lulusannya memasuki lapangan kerja, karena pada hakekatnya sekolah kejuruan adalah **vocational education** sehingga lebih berorientasi kepada dunia kerja daripada yang bersifat akademik. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan khusus yang terutama diarahkan terhadap pengembangan keterampilan pekedaan tertentu. Pendidikan kejuruan

merupakan proses pemberian semua tingkat belajar yang berhubungan dengan kerja. Rasionalitas pendidikan kejuruan merupakan seperangkat pengetahuan yang disetujui mengenai tujuan, kebijakan, organisasi, kurikulum, metode mengajar, dan metode belajar yang direncanakan untuk menghasilkan kompetensi kerja. Dari uraian ini dapat dinyatakan bahwa sekolah kejuruan mempunyai misi untuk mempersiapkan orang yang belum bekerja agar dapat memasuki lapangan kerja. Untuk dapat memasuki lapangan kerja lulusan sekolah kejuruan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakan. Ini berarti kemampuan lulusan sekolah kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Dengan kata lain kemampuan siswa merupakan replika dunia industri. Salah satu faktor penentu kesesuaian kemampuan yang dimiliki siswa dengan kebutuhan lapangan kerja adalah kurikulum sekolah. Agar kurikulum dapat mencerminkan kemampuan yang diharapkan dunia industri, maka pengembangan kurikulum membutuhkan teknik pengembangan yang tepat. Selain itu perlu alternatif bentuk atau strategi pengajaran yang dipandang sesuai untuk mencapai tujuan pengajaran. Sekolah kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan sekolah umum. Perbedaan karakteristik tersebut memberikan ciri khas yang berbeda pula dalam pengembangan kurikulum sekolah kejuruan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirinci antara lain: (1) orientasi sekolah kejuruan menengah adalah pada pencapaian penampilan kerja di lapangan kerja, (2) fokus pengembangan kurikulum sekolah kejuruan tidak hanya pada segi kognitif dan efektif tetapi juga segi psikomotorik dengan sasaran agar lulusan dapat menerapkan kemampuannya di lapangan kerja, (3) kriteria sukses meliputi dua hal, yaitu standar sukses di sekolah dan di luar sekolah. Standar sukses di sekolah ditentukan sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara nyata, sedangkan standar sukses di luar sekolah dicerminkan sejauh mana siswa dapat menerapkan kemampuannya di lapangan kerja, (4) peka (responsif) terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia kerja, hal ini memberikan konsekuensi bahwa kurikulum sekolah kejuruan hendaknya fleksibel terhadap kebutuhan kualifikasi lapangan

kerja, (5) hubungan sekolah dengan masyarakat lebih intensif baik dalam bentuk hubungan kerja sama dalam memperoleh informasi ketenagakeraan maupun dalam bentuk kerja sama menyelenggarakan pendidikan, (6) dukungan logistik dan pembiayaan harus memadai untuk menyediakan fasilitas praktek yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dunia industri pada masa sekarang dan yang akan datang, dan (7) prediksi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah kejuruan relatif lebih cepat dibandingkan dengan sekolah umum. Namun demikian menurut McNeil (1996) tidak semua orang yakin bahwa pendidikan kejuruan harus difokuskan pada teknologi tinggi, karena beberapa studi menunjukkan bahwa hingga tahun 2001 hanya tujuh persen bidang pekerjaan baru membutuhkan teknologi tinggi. Tuntutan utama kebutuhan tenaga kerja pada dekade mendatang tidak pada ahli-ahli komputer dan teknik tetapi untuk jururawat, pramuniaga, pekerja restoran dan siap saji, sekretaris, pengemudi trek, dan juru masak. Oleh sebab itu pendidikan kejuruan perlu melakukan diversifikasi keterampilan bukannya terfokus pada latihan siswa untuk suatu karir dalam satu jabatan saja, tetapi siswa juga diberikan pengetahuan teknik berbasis luas dan kemampuan berkomunikasi. Menurut Sibuea (1996) agar kemampuan yang dimiliki siswa dapat sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja diperlukan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pihak penggunaan lulusan.

Kurikulum sekolah kejuruan dapat mencerminkan kemampuan yang diharapkan bila pembuatannya melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah kejuruan, misalnya pihak dunia usaha dan dunia kerja, Depnaker, Depperindag, masyarakat dan lain-lain.

Selain itu materi kurikulum harus mencerminkan tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa di lapangan kerja. Variabilitas isi kurikulum harus diperhatikan juga yang meliputi fleksibilitas waktu dan isi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian bukan berarti kurikulum akan selalu berubah, oleh sebab itu perlu diciptakan mekanisme yang dapat mengantisipasi kebutuhan lapangan kerja. Dalam mengembangkan isi kurikulum sekolah kejuruan ada beberapa model yang dapat digunakan. Finch dan Crunkilton (1984) menawarkan empat pendekatan yaitu **pendekatan filosofi, DACUM,**

fungsi dan **Delphi**. Objektivitas dalam menemukan materi kurikulum dari keempat pendekatan ini dapat dianggap berada pada dua ujung garis kontinum, artinya bahwa untuk menghasilkan materi kurikulum pendekatan-pendekatan tersebut menerapkan cara-cara yang berada pada suatu titik kontinum subjektif-objektif.

Pendekatan Filosofi, Pendekatan ini menggunakan filosofi sebagai dasar untuk mengembangkan materi kurikulum dengan demikian sejarah turut mempengaruhi pengembangan kurikulum. Filosofi ini dapat dinyatakan sebagai pendapat-pendapat atau pernyataan-pernyataan yang meyakinkan dan setiap pernyataan itu memberikan kontribusi untuk keseluruhan filosofi. Filosofi dapat cenderung memunculkan pernyataan yang bervariasi antara individu dengan individu yang lain serta antara kelompok dengan kelompok yang lain sebagaimana diharapkan nilai di daerah tersebut. Keadaan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam kelompok untuk menetapkan pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat yang meyakinkan dan diterima dengan suara bulat. Pendekatan filosofi selalu berpedoman pada hal-hal yang baik untuk diajarkan dengan mengacu pada kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, psikologi belajar, dan pendapat ahli bidang studi.

Bila pendekatan filosofi dibandingkan dengan pendekatan yang lain, maka strategi ini dipandang lebih subjektif karena suatu filosofi khusus atau sekumpulan filosofi digunakan sebagai dasar untuk menentukan materi kurikulum. Pendekatan ini relatif khusus digunakan dalam mengembangkan kurikulum yang sifatnya akademis.

Pendekatan DACUM, Pada pendekatan DACUM (*Developing A Curriculum*) kurikulum dibuat oleh suatu panitia tanpa melibatkan guru. Panitia tersebut terdiri atas Depnaker, Deperindag, Serikat Buruh, pihak industri/perusahaan, dan lain-lain. Dengan tidak melibatkan guru diharapkan hasil yang diperoleh lebih obyektif. Panitia mengidentifikasi seluruh keterampilan yang dianggap termasuk kompetensi yang harus dimiliki oleh jabatan atau pekadaan tertentu. Dalam proses pengidentifikasian keterampilan ini data yang ada makin berkurang. hingga merupakan suatu kurikulum yang mencakup profil kompetensi lulusan sekolah kejuruan. Pada penentuan kriteria perdebatan

masih berlangsung sampai akhirnya diperoleh profil kompetensi dan tingkat kompetensi untuk setiap jabatan masih berlangsung sampai akhirnya diperoleh profil kompetensi dan tingkat untuk setiap jabatan pekeadaan. Untuk menemukan profil dan tingkat kompetensi Finch dan Crunkilton (1984) mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh yakni: (1) mengkaji suatu deskripsi jabatan pekeadaan, (2) mengidentifikasi kompetensi jabatan, (3) mengidentifikasi berbagai keterampilan atau perilaku untuk masing-masing, dachrah kompetensi, (4) menyusun keterampilan ke dalam suatu urutan pengalaman belajar, dan (5) menetapkan tingkat kompetensi untuk masing-masing keterampilan sesuai dengan situasi keda yang sebenarnya. Konsep kurikulum yang telah tersusun dikonsultasikan dengan pihak pendidikan tentang bagaimana teknik pelaksanaannya di sekolah. Pendekatan DACUM lebih obyektif dibandingkan dengan pendekatan filosofi dalam menemukan materi kurikulum karena keterampilan yang ditemukan lebih relevan dengan dunia keda, melalui cara yang ditempuh dalam pendekatan ini diperoleh keunggulan-keunggulan antara lain yakni, membutuhkan dana yang relatif kecil, waktu dalam mengembangkan kurikulum relatif singkat, dan penentuan materi kurikulum tidak melibatkan intervensi pihak pendidikan.

Pendekatan Fungsi, Pendekatan fungsi dipandang merupakan pendekatan yang paling dapat dipertanggungjawabkan dalam mengembangkan materi kurikulum khususnya dalam bidang industri dan bisnis. Hal ini cukup beralasan oleh karena pengembangan kurikulum didahului dengan analisis tugas sehingga kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam suatu bidang pekeadaan dapat mencerminkan kemampuan nyata di lapangan kerja. Dalam mengembangkan kurikulum dilakukan kegiatan yakni (a) menetapkan tujuan-tujuan industri dan menampilkan fungsifungsi yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tersebut, (b) membuat daftar kegiatan-kegiatan yang dikembangkan untuk masing-masing fungsi, (c) membuat daftar berbagai macam kompetensi yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam suatu fungsi yang telah dikembangkan, dan (d) kegiatan-kegiatan dan kompetensi-kompetensi dikelompokkan menjadi daerah yang cocok untuk tujuan mengembangkan pendidikan/latihan yang sesuai agar seseorang memiliki

kemampuan untuk bekerja di industri atau bisnis. Hasil kegiatan ini selanjutnya dibahas oleh suatu tim untuk menemukan suatu konsensus mengenai materi yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Sebelum pengembangan kurikulum dilakukan terlebih dahulu dilaksanakan analisis tugas untuk menemukan indentifikasi tugas-tugas dari suatu jabatan tertentu. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis tugas ini antara lain mengkaji literatur yang relevan, mengembangkan inventarisasi pekedaan, memilih sampel pekerja, mengadministrasi inventaris, dan menganalisis informasi yang tdlah terkumpul.

Pendekatan Delphi, hampir sama dengan pendekatan DACUM. Hanya saja pendekatan Delphi memanfaatkan ahli (**expert**) dalam menyusun materi kurikulum dengan cara meminta secara tertulis tentang kompetensi yang harus dimiliki lulusan sekolah kejuruan tanpa berkonsultasi di antara ahli satu sama lain. Pendekatan ini dipandang sebagai cara yang lebih baik karena secara langsung diarahkan pada bidang keterampilan yang berorientasi pada masa yang akan datang. Pengembangan kurikulum dengan pendekatan Delphi melakukan berbagai usaha agar materi yang dikembangkan dapat relevan dengan tujuan sekolah dan sesuai dengan bidang pekedaan. Dalam pendekatan ini lembaga pendidikan membentuk panitia dengan struktur kepanitiaan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk menemukan materi kurikulum, **pertama** panitia meminta identifikasi isi kurikulum dari setiap ahli dengan bentuk daftar secara tertulis, data tersebut dikumpulkan dan diidentifikasi untuk selanjutnya dikirim kembali kepada pars ahli dengan tujuan untuk mendapatkan penyempurnaan. Setelah panitia memperoleh masukan **kedua** dari ahli kemudian dibuat lagi daftar baru yang kuantitasnya makin kecil hingga akhirnya menghasilkan kurikulum. Semua komunikasi antara panitia dengan ahli dilakukan secara tertulis tanpa ada konsultasi satu sama lain baik antara panitia dengan ahli maupun antara ahli dengan ahli yang lain. Menurut Finch dan Crunkilton (1984) pada dasarnya pendekatan Delphi mencakup empat putaran kegiatan.

Pertama memberikan daftar kepada ahli untuk mengidentifikasi materi kurikulum yang dipandang perlu. Masing-masing daftar tanpa nama dan tidak

bertatap muka antara yang satu dengan yang lain. **Kedua**, pada ronde kedua masing-masing ahli menerima kembali daftar yang telah tersusun sesuai dengan jawaban sebelumnya untuk memperoleh perbaikan-perbaikan dan selanjutnya dikirim kembali kepada perancang kurikulum. **Ketiga**, para ahli diminta mengkaji dan memperbaiki pendapatnya yang terdahulu dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. **Keempat**, pada putaran keempat para ahli diminta kembali membuat revisi akhir mengenai materi yang telah disepakati sebelumnya. Melalui teknik Delphi dapat diperoleh informasi yang cukup bermanfaat dalam pengembangan materi kurikulum, namun demikian teknik ini membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang relatif banyak.

D. Kebutuhan Guru SMK

1. Profil Sekolah Menengah Kejuruan

Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia 4.751 terdiri atas 1.088 SMK Negeri dan 3.663 SMK Swasta. Distribusi SMK untuk seluruh Provinsi ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

TABEL 1
JUMLAH SMK DI BERBAGAI PROVINSI DI INDONESIA

No.	PROPINSI	SMK	
		NEGERI	SWASTA
1	DKI JAKARTA	53	600
2	JAWA BARAT	75	440
3	JAWA TENGAH	146	612
4	DI. YOGYAKARTA	44	167
5	JAWA TIMUR	143	632
6	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	33	28
7	SUMATERA UTARA	43	225
8	SUMATERA BARAT	27	35
9	R I A U	28	50
10	J A M B I	22	20
11	SUMATERA SELATAN	28	67
12	LAMPUNG	33	166
13	KALIMANTAN BARAT	30	78
14	KALIMANTAN TENGAH	14	11
15	KALIMANTAN SELATAN	28	34
16	KALIMANTAN TIMUR	28	74
17	SULAWESI UTARA	17	50
18	SULAWESI TENGAH	31	38
19	SULAWESI SELATAN	63	87

20	SULAWESI TENGGARA	12	10
21	MALUKU	18	17
22	B A L I	26	32
23	NUSA TENGGARA BARAT	35	15
24	NUSA TENGGARA TIMUR	19	33
25	PAPUA	21	16
26	BENGKULU	24	25
27	MALUKU UTARA	11	4
28	BANTEN	6	34
29	BANGKA BELITUNG	17	56
30	GORONTALO	13	7
	TOTAL NASIONAL	1.088	3.663

2. Bidang Keahlian dan Program Keahlian

Bidang keahlian di SMK sebanyak 34, dari 34 keahlian tersebut dikembangkan menjadi 121 program keahlian. Bidang Keahlian di SMK adalah sebagai berikut.

1. Teknik Bangunan Gedung
2. Perabot
3. Teknik Survey dan Pemetaan
4. Teknik Listrik
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Teknik Radio, Televisi dan Film
7. Teknik Elektronika
8. Teknik Pendingin & Tata Udara
9. Tekni Mmesin
10. Bisnis dan Manajemen
11. Pariwisata
12. Tata Boga
13. Tata Kecantikan
14. Tata Busana
15. Pekerjaan Sosial
16. Pembibitan Tanaman
17. Budidaya Ternak
18. Budidaya Ikan
19. Teknologi Hasil Pertanian
20. Seni Rupa
21. Kerajinan
22. Seni Prtunjukkan
23. Teknologi Pesawat Terbang
24. Teknik Perkapalan
25. Teknologi Tekstil
26. Grafika
27. Geologi Pertambangan

- 28. Instrumentasi Industri
 - 29. Kimia
 - 30. Pelayaran
 - 31. Telekomunikasi
 - 32. Keperawatan
 - 33. Analisis Kesehatan
 - 34. Kefarmasian
3. Profil Guru Sekolah Menengah Kejuruan

Guru SMK Negeri di Indonesia sebanyak 53.627 dan Swasta 98.815. Secara lebih rinci ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

TABEL 2
JUMLAH GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2005

No.	PROVINSI	JUMLAH GURU SMK	
		NEGERI	SWASTA
1	DKI JAKARTA	2.877	15.567
2	JAWA BARAT	5.085	12.496
3	JAWA TENGAH	7.613	18.267
4	DI. YOGYAKARTA	3.744	6.373
5	JAWA TIMUR	7.627	18.019
6	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.582	680
7	SUMATERA UTARA	1.687	4.795
8	SUMATERA BARAT	1.365	807
9	R I A U	1.445	1.357
10	J A M B I	1.076	452
11	SUMATERA SELATAN	1.867	1.929
12	LAMPUNG	1.211	4.334
13	KALIMANTAN BARAT	1.090	1.611
14	KALIMANTAN TENGAH	417	223
15	KALIMANTAN SELATAN	1.170	1.053
16	KALIMANTAN TIMUR	1.396	1.713
17	SULAWESI UTARA	800	890
18	SULAWESI TENGAH	897	662
19	SULAWESI SELATAN	2.008	1.651
20	SULAWESI TENGGARA	531	216
21	MALUKU	782	209
22	B A L I	1.448	976
23	NUSA TENGGARA BARAT	1.672	459
24	NUSA TENGGARA TIMUR	713	693
25	PAPUA	716	320
26	BENGGULU	1.005	477
27	MALUKU UTARA	303	54

28	BANTEN	324	889
29	BANGKA BELITUNG	658	1.498
30	GORONTALO	518	145
	TOTAL NASIONAL	53.627	98.815

Profil guru SMK bila dilihat dari jenjang pendidikan ditunjukkan pada tabel 3 berikut.

TABEL 3
PROFIL GURU BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Ijazah Tertinggi				
			< D1	D2	D3	Sarjana	S-2/S-3
1	TK	137,069	90.57	5.55	-	3.88	-
2	SLB	8,304	47.58	-	5.62	46.35	0.45
3	SD	1,234,927	49.33	40.14	2.17	8.30	0.05
4	SMP	466,748	11.23	21.33	25.10	42.03	0.31
5	SM	452,255	2.06	1.86	26.37	69.39	0.33
6	SMA	230,114	1.10	1.89	23.92	72.75	0.33
7	SMK	147,559	354.00	1.79	30.18	64.16	0.33
8	PT	236,286	-	-	-	56.54	43.46

4. Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan

Kebutuhan total guru SMK tahun 2005 berjumlah 12.220 orang, dengan rincian kebutuhan guru baru sebesar 11.045 orang dan untuk mengisi yang pensiun sebanyak 1.175 orang seperti terinci pada tabel 4 berikut:

TABEL 4
KEBUTUHAN GURU TAHUN 2004 –2005

	2004		2005		KEBUTUHAN TOTAL TH. 2005
	KEBUTUHAN GURU BARU	PENSIUN	KEBUTUHAN GURU BARU	PENSIUN	
TK	893	187	1.080	260	1.340
SD	63.144	20.399	83.543	23.918	107.461
SMP	57.537	4.707	62.244	6.270	68.514
SMU	26.120	1.498	27.618	1.685	29.303
SMK	9.972	1.073	11.045	1.175	12.220
TOTAL	157.666	27.864	185.530	33.308	218.838

BAB III

PEMBAHASAN

Pasal 2, ayat (3) ditetapkan bahwa kewenangan:

Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan meliputi:

- (1) Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar
- (2) Pengaturan kurikulum nasional
- (3) Penilaian hasil belajar secara nasional
- (4) Penetapan standar materi pelajaran pokok
- (5) Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
- (6) Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
- (7) Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
- (8) Penetapan kalender dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
- (9) Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional
- (10) Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia

Kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan mencakup :

- (1) Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu
- (2) Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah
- (3) Mendukung atau membantu penyelenggaraan perguruan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis
- (4) Pertimbangan dan penutupan perguruan tinggi
- (5) Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru

- (6) Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Kewenangan kabupaten dan kota mencakup :

- (1) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SMU dan SMK
- (2) Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU dan SMK
- (3) Melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan kurikulum muatan lokal
- (4) Mengembangkan standar kompetensi siswa TK,SD,SLTP,SMU dan SMK dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah
- (5) Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah
- (6) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (7) Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (8) Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (9) Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- (10) Mengadakan blangko STTB dan Danem SD, SLTP dan SMK
- (11) Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK,SD,SLTP dan SMK
- (12) Memantau dan mengavluasi penggunaan sarana dan prasarana TK,SD,SLTP dan SMK

- (13) Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (14) Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (15) Menetapkan kebijakan pelaksanaan pengawasan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (16) Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa TK,SD,SLTP dan SMK atas dasar kebijakan pemerintah
- (17) Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK,SD,SLTP dan SMK
- (18) Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK,SD,SLTP dan SMK
- (19) Melaksanakan akreditasi TK,SD,SLTP dan SMK
- (20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK,SD,SLTP dan SMK
- (21) Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah
- (22) Membina pengelolaan TK,SD,SLTP dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/ bencana
- (23) Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh
- (24) Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh
- (25) Menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah
- (26) Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah
- (27) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah
- (28) Menetapkan sistem dan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah
- (29) Melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah

- (30) Menetapkan pedoman penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah
- (31) Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah
- (32) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis kebudayaan
- (33) Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis kebudayaan
- (34) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan TK,SD,SLTP dan SMK dan pendidikan luar sekolah serta tenaga teknis kebudayaan
- (35) Menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah
- (36) Menetapkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan (termasuk memperjuangkan alokasi anggaran Dikbud)
- (37) Menetapkan petunjuk pelaksanaan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten dan kota
- (38) Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbud di kabupaten dan kota yang bersumber dari APBN
- (39) Menetapkan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dikbud di kabupaten dan kota
- (40) Memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang Dikbud di kabupaten dan kota
- (41) Menetapkan pemberian penghargaan atau tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten dan kota serta mengusulkan pemberian penghargaan atau tanda jasa tingkat nasional
- (42) Menetapkan pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan dan kebudayaan di kabupaten dan kota
- (43) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan Dikbu di kabupaten dan kota

- (44) Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan Dikbu kabupaten dan kota
- (45) Mengembangkan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal di kabupaten dan kota
- (46) Melaksanakan inovasi Dikbud di kabupaten dan kota
- (47) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
- (48) Menetapkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan atas dasar pedoman yang ditetapkan

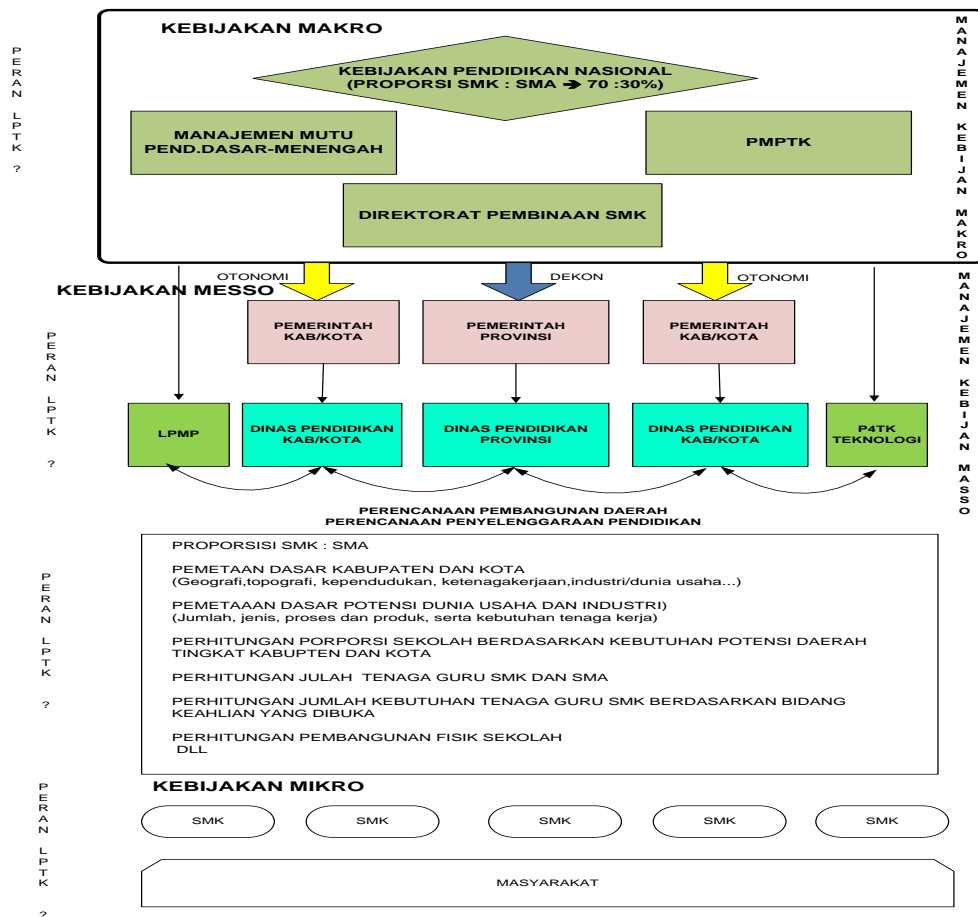
Keempatpuluh delapan aspek kewenangan daerah kabupaten dan kota dalam kebijakan pendidikan, tampaknya akan memberikan implikasi terhadap kewenangan Kantor Dinas Pendidikan di masing-masing daerah. Kondisi tersebut, tentunya dapat diindikasikan bahwa untuk mengimplemen-tasikan kebijakan kekuatannya sangat bertumpu di tingkat Dinas Pendidikan kabupaten dan kota. Persoalannya sejauhmana kesiapan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dalam mengadaftasi kebijakan dan mengimplementasikan yang didalamnya mengandung faktor-faktor pendukung penyelenggaraan SMK.

Persiapan implementasi kebijakan pendidikan pada tataran meso yang ada di tingkat kabupaten dan kota, sangat terkait dengan “perencanaan pembangunan daerah”, yang terintegrasi dengan sistem politik, ekonomi, geografi, kependudukan, dan ketenagakerjaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sudah dapat diindikasikan bahwa implementasi kebijakan proposisi SMK:SMA secara nasional harus sinejik dengan perencanaan di daerah memerlukan kecermatan, ketelitian dan kepastian ekonomi pendidikan sehingga terjadinya sistem perencanaan yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Secara empirik, belum semua daerah mempunyai tenaga perencana pendidikan yang mempunyai kompetensi. Kondisi inilah, merupakan suatu tantangan bagi LPTK untuk berperanserta dalam mendampingi implementasi kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah.

Bertolak paparan tersebut, menjadi tantangan untuk disikapi secara ilmiah dan profesional, serta proporsional bagi LPTK khususnya FPTK, FT dan JPTK untuk memberikan kontribusi agar kebijakan tersebut tepat sasaran sesuai dengan nilai-nilai dasar kebijakan pendidikan nasional.

A. Batasan Pembahasan

Berdasarkan paparan rasional, yang menjadi batasan-batasan pengkajian dalam makalah ini mencakup profesionalisme kelembagaan dalam berperanserta, pengembangan program yang relevan; dan substansi yang menjadi garapan profesional di masa depan. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut;



Ga

Gambar 1. Posisi Kebijakan Pendidikan Nasional

(Dalam Konteks Sinerjisitas Implementasi Kebijakan Proporsi untuk SMK:SMA)

Gambar tersebut, menunjukkan hirarki kebijakan makro sampai dengan

mikro. Hal ini, memberikan konsekuensi pada manajemen pada setiap jenjang dan tingkatan yang terkait secara institusi.

Ditinjau dari sudut pandang akademik dan empirik, sesungguhnya LPTK mempunyai kemampuan dalam berperanserta mendampingi kebijakan nasional tersebut. Persoalannya, adalah masing-masing LPTK sebagai institusi di Indonesia mempunyai karakteristik yang khas di setiap tempat. Sehingga peluang yang ada, seringkali kurang dioptimalkan. Pada saat ini, hal itu akan lebih terbuka dengan semangat otonomi daerah. Sehingga ada peluang untuk membangun citra kepercayaan masing-masing daerah, dalam mengoptimalkan sumber-sumber institusi Perguruan Tinggi.

Bertitik tolak dari paparan yang telah dikemukakan, maka pengkajian dalam makalah ini, dapat difokuskan pada " Strategi FPTK/FT/JPTK dalam menyikapi implikasi kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA = 70:30%". Secara umum tujuan dari pengkajian ini, adalah diperoleh rancangan strategi bagi FPTK/FT/JPTK untuk berperanserta dalam implementasi kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA + 70 :30%.

B. Pembahasan

Kebijakan pendidikan pada tingkat makro secara hakiki merupakan konsensus dari seluruh komponen bangsa. Setiap kebijakan pada dasarnya adalah untuk memecahkan masalah termasuk proporsi 70 :30% untuk SMA :SMK. Proposi ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang berorientasi terciptanya sumber daya manusia produktif, karena bertolak dari asumsi bahwa SMK dapat memberikan seperangkat kompetensi bagi lulusannya, dengan harapan dapat bekerja di industri atau membuka lapangan kerja mandiri.

Suatu keadaan yang perlu disikapi oleh LPTK dalam hal ini FPTK/FT/JPTK, dalam pengidentifikasian masalah yang dihadapi oleh berbagai institusi mencakup:

Pertama, berdasarkan analisis posisi tingkatan kebijakan pendidikan dalam konteks sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, mempunyai kompleksitas tinggi sesuai dengan potensi daerah. Dibandingkan dengan

pada saat negara kita menganut sentralisasi, kebijakan dapat dilaksanakan dalam satu komando dan manajemen yang terkendali melalui seperangkat petunjuk pelaksanaan dan teknis. Implikasinya kondisi saat ini, pemerintah pusat, provinsi sebagai pelaksana dekonsentrasi dan daerah otonom (kabupaten dan kota) perlu adanya tingkatan pemahaman substansi untuk menyamakan persepsi dan penetapan kebijakan pada tingkatannya.

Kedua, substansi suatu kebijakan proposi jumlah siswa SMK:SMA= 70:30% pada setiap tingkatan argumen menyangkut konsepsi; (1) informasi yang relevan; (2) tuntutan kebijakan; (3) pembenaran (*warrant*); (4) dukungan (*backing*); (5) bantahan (*rebuttal*); dan (6) syarat (*qualifier*). Implikasinya adalah setiap tingkat perlu ada pemahaman yang mendekati kebulatan makna, agar di dalam implementasinya tidak menimbulkan multi tafsir.

Keempat, standard dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standard dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respons para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standard dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain. Implikasinya adalah setiap tingkatan, perlu memahami adanya standar untuk melaksanakan pengadministrasian sumber-sumber daya pendidikan.

Kelima, implementasi kebijakan yang ditetapkan, terdapat tahapan, yang bersifat (a) *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya; dan (b) *non self-executing* yang

berarti bahwa suatu kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks kebijakan proporsi jumlah siswa SMK:SMA = 70:30%, ada indikasi termasuk bersifat *non self-executing*. Implikasinya adalah adanya keterlibatan berbagai pihak, dengan tuntutan kepatuhan yang tinggi.

Keenam, faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumber-sumber daya pada setiap tingkatan, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi (sikap) para pelaksana. Implikasinya adalah, kerawanan konflik disfungsional, oleh karena itu perlu adanya penyeimbang mulai dari proses penyusunan program sampai dengan evaluasinya.

Bertolak dari asumsi-asumsi dasar konsep implementasi kebijakan pendidikan nasional, maka peluang yang harus menjadi perhatian adalah :

- (1) Pendampingan proses komunikasi melalui keterlibatan desiminasi kebijakan**
- (2) Pendampingan manajemen implementasi di setiap tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) melalui keterlibatan dalam perencanaan pada tingkat kabupaten dan kota**
- (3) Penyiapan sumber-sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik dan kependidikan, dengan berbagai bidang keahlian sesuai dengan kemungkinan kebutuhan daerah yang sangat bervariasi.**

Berdasarkan peluang yang mungkin, maka diperlukan suatu strategi yang sesuai dengan masing-masing LPTK dalam hal ini FPTK/FT/JPTK di mana berada. Strategi yang dikembangkan tentunya, berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan masing-

masing wilayah. Namun demikian, penulis mencoba memberikan deskripsi dalam forum ini, sebagai berikut:

a. Sesama LPTK dan Tingkat Birokrasi Pemerintah Pusat

Adanya tukar informasi berkenaan dengan struktur dan tuntutan kebijakan nasional yakni kepastian hukum dilaksanakannya proporsi jumlah siswa SMK : SMA = 70:30%. Hal ini penting diperhatikan, agar tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga LPTK tidak terjebak pada ketidakpastian

Oleh sebab itu, perlu ada kesepahaman dalam menyikapi dan mengkritisi makna proporsi jumlah. Dengan demikian, paling tidak ada hal yang perlu disikapi bersama meliputi:

- (1) Pendefinsian, kejelasan model implementasi kebijakan proporsi yang diharapkan pemerintah pusat
- (2) Melakukan aksi penyusunan kriteria dan penyusunan formula proporsi yang direkomendasikan kepada birokrat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Kenyataan ini perlu mendapat perhatian bersama, mengingat belum semua LPTK memperoleh kesamaan informasi dari kebijakan nasional. Kondisi tersebut, belum semua LPTK di Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan.

b. Internal LPTK

Agar LTPK khususnya FPTK/FT/JPTK dapat memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan pendidikan kejuruan secara nasional, maka diperlukan langkah strategik, mencakup;

- (1) Membangun citra kepercayaan kelembagaan pada setiap tingkatan kebijakan, melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang diseminasi kebijakan; bidang perencanaan pendidikan
- (2) Membangun jaringan birokrasi pelaksana kebijakan pendidikan, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang negoisasi.
- (3) Menata sistem manajemen yang transparans dengan memperhatikan akuntabilitas dan *good governance*.
- (4) Menata sistem pelayanan pendidikan kejuruan melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah; ditinjau dari bidang dan program keahlian yang dibutuhkan.
- (5) Pengembangan kapasitas kelembagaan (SDM, sarana prasarana, manajemen, pembiayaan, kemitraan dan lain sebagainya). Hal ini merujuk pada standar yang diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan.

Kondisi tersebut, merupakan modal dasar yang dapat dipercaya lembaga pelaksana kebijakan untuk turut berperan serta di wilayah masing-masing. Apabila hal itu, tidak dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan peluang akan diberikan kepada Perguruan Tinggi non LPTK, yang selama ini telah berperanserta dalam perencanaan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.